

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DALAM ASPEK PEMBELAJARAN (Studi Kasus di SMPN 1 Paringin dan SMPN 4 Awayan Kabupaten Balangan)

Nor Inayah¹, Jumaidi², Reno Affrian³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : n.inayah@gmail.com

ABSTRAK

Program sekolah penggerak meliputi 5 Intervensi Program meliputi Pendampingan Konsultatif dan Asimetris, Penguatan Sumber Daya Manusia di Sekolah, Pembelajaran dengan Paradigma Baru, Perencanaan Berbasis Data dan Digitalisasi Sekolah. Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Aspek Pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara Snowball Sampling, teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Aspek Pembelajaran (Studi Kasus di SMPN 1 Paringin dan SMPN 4 Awayan Kabupaten Balangan) cukup baik dilihat dari 1) tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi kejelasan tujuan dan sasaran cukup baik dan ketepatan target kurang baik. 2) dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan meliputi dasar perumusan kebijakan sudah cukup baik, fakta lapangan yang menjadi dasar pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sudah baik. 3) proses implementasi memiliki dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum yang cukup baik. 4) komitmen kerja yang cukup baik dan keahlian petugas yang kurang baik, 5) dukungan para stakeholder yang meliputi dukungan pemerintah dan instansi terkait kurang baik, bentuk dukungan pemerintah masih belum terealisasi secara optimal. 6) stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat kurang baik, kondisi ekonomi masyarakat kurang baik. Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor penghambat yakni sumber daya yang kurang memadai, kemudian faktor pendorong meliputi tanggungjawab kerja petugas pelaksana dinilai cukup baik dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program Sekolah Penggerak

ABSTRACT

The driving school program includes 5 program interventions including consultative and asymmetric assistance, strengthening human resources in schools, learning with a new paradigm, data-based planning and school digitalization. The aim of the research is to determine the Implementation of the Driving School Program Policy in Learning Aspects and the factors that influence it. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants using Snowball Sampling, the analysis techniques used are reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research state that the implementation of the Driving School Program Policy in the Learning Aspect (Case Study at SMPN 1 Paringin and SMPN 4 Awayan, Balangan Regency) is quite good in terms of 1) clear and consistent policy goals or objectives including clarity of goals and targets which are quite good and target accuracy is not good. 2) strong theoretical support in formulating policies including the basis for policy formulation is good enough, the facts on the ground which are the basis for implementing the Driving School Program are good. 3) the implementation process has a clear legal basis including a fairly good legal basis. 4) work commitment is quite good and the skills of officers are not good, 5) support from stakeholders which includes support from the government and related agencies is not good, the form of government support is still not realized optimally. 6) stability of social, economic and political conditions related to poor social conditions in society, poor economic conditions in society. Influencing factors include inhibiting factors, namely inadequate resources, then driving factors include the work responsibilities of implementing officers who are considered quite good in implementing the Driving School Program.

Keywords: Policy Implementation, Driving School Program

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa maju. Untuk membakukan mutu pendidikan Indonesia, proses pelaksanaannya memerlukan kebijakan pendidikan. Melalui pengembangan peserta didik Pancasila yang mampu berpikir kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, dan memiliki keberagaman global, maka visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan pendidikan yang maju. Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan individualistis.

Demi tercapainya visi pendidikan tersebut, diterbitkan surat edaran nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar atau Kebebasan Belajar. Konsep Kebebasan Belajar, yaitu membebaskan institusi pendidikan, mendorong peserta didik untuk berinovasi dan mendorong pemikiran kreatif. Maksud dari Merdeka Belajar bertujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ide ini merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dan inovatif serta merupakan tantangan besar dalam dunia pendidikan. Merdeka Belajar adalah kebebasan Lembaga pendidikan (sekolah, guru dan murid) dalam berinovasi, mandiri dan kreatif. Bertujuan agar pendidik, peserta didik, dan orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Proses pendidikan harus membuat situasi yang membahagiakan. Bahagia untuk guru, bahagia untuk peserta didik, bahagia untuk orang tua, dan bahagia untuk semua orang (Bayumie, 2020).

Program Sekolah Penggerak akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah seperti multiplier effect sekolah Penggerak terhadap sekolah lain, menjadi model dalam membangun sekolah Penggerak, dan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Selain itu, Sekolah Penggerak juga merupakan katalisator terwujudnya visi pendidikan Indonesia, yaitu sekolah yang menerapkan profil Siswa Pancasila dan diawali dengan sumber daya manusia yang unggul untuk mengembangkan hasil belajar siswa secara holistik.

Daftar sekolah penggerak di Kabupaten Balangan adalah Sekolah Negeri meliputi SD Baruh Penyambaran, Halong, SDN Dahai, Paringin, SD Hujan Mas 1, Paringin, SD Batu Merah 1 dan SD Jimamun, di Kecamatan Lampihong, SMPN 1 Paringin, SMP 4 Awayan, SD 1 Paringin Selatan, SD Hamarung 2 Kecamatan Juai.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa yang menjadi permasalahan berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Aspek Pembelajaran (Studi Kasus di SMPN 1 Paringin dan SMPN 4 Awayan Kabupaten Balangan) di antaranya:

1. Target yang belum dapat tercapai secara optimal terkait mencapai tujuan meliputi peningkatan hasil belajar siswa dengan memahami Profil Siswa Pancasila yang memuat kemampuan dan karakter dimulai dari SDM unggul.
2. Dukungan stakeholder yang kurang optimal dalam hal koordinasi pelaksanaan program sekolah penggerak antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dengan sekolah-sekolah yang menjadi pelaksana program sekolah penggerak. (Sumber: Observasi Penulis, Oktober 2023)
3. Sumber daya yang kurang memadai dilihat dari kurangnya ketersediaan SDM guru di daerah pelosok selain itu selain itu terbatasnya kemampuan para guru untuk mengembangkan kurikulum dalam proses pembelajaran dikarenakan kurangnya pelaksanaan pelatihan atau pembinaan teknis terkait penyelenggaraan program.

Fenomena masalah tersebut mendorong penulis untuk meneliti **“Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Aspek Pembelajaran (Studi Kasus di SMPN 1 Paringin dan SMPN 4 Awayan Kabupaten Balangan)”**.

METODE

Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 2.5, Kecamatan Paringin Selatan Desa Lingsir Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan 71662.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan *Snowball Sampling* dengan jumlah informan sebanyak 12 orang, teknik analisis yang digunakan yakni reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Aspek Pembelajaran (Studi Kasus di SMPN 1 Paringin dan SMPN 4 Awayan Kabupaten Balangan)

1. Tujuan atau Sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten

a. Kejelasan tujuan dan sasaran

Kejelasan tujuan yang diharapkan dari Program Sekolah Penggerak tersebut dinilai sudah baik adalah untuk pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter ataupun pengetahuan teknologi seperti komputer jaringan internet dan lain sebagainya.

b. Ketepatan Target

Kurang tercapainya sasaran dari program sekolah penggerak dikarenakan masih banyak para Guru yang kurang dapat mengikuti perkembangan digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi.

2. Dukungan Teori yang Kuat dalam Merumuskan Kebijakan

a. Dukungan Teori proses Perumusan Kebijakan

Proses perumusan kebijakan tersebut sudah tergolong baik sesuai dengan peraturan dan fakta dilapangan sehingga aturan tersebut adalah benar-benar untuk pengembangan kompetensi siswa serta SDM para Kepala Sekolah dan Guru-guru.

b. Fakta Lapangan

Fakta perumusan kebijakan Kepmendikbudristek Nomor 162 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Penggerak maka program tersebut mempunyai sasaran yang jelas untuk pengembangan kompetensi siswa serta SDM para Kepala Sekolah dan Guru-guru.

3. Proses Implementasi Memiliki dasar Hukum jelas

a. Adanya dasar Hukum yang Jelas

Dasar hukum Program Sekolah Penggerak tersebut adalah sudah baik yakni Kepmendikbudristek No.162 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Penggerak selain itu juga berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk pengembangan kompetensi siswa serta SDM para Kepala Sekolah dan Guru-guru.

4. Komitmen dan Keahlian para Pelaksana Kebijakan

a. Komitmen Petugas Pelaksana Kebijakan

Para petugas memiliki komitmen kerja yang cukup baik, hal tersebut dilihat dari taatnya mereka pada peraturan yang telah ditentukan.

b. Keahlian Petugas

Keahlian petugas tergolong kurang baik karena masih ada petugas kurang mahir memberikan penjelasan mengenai proses pelaksanaan Pendidikan maupun tujuan dari

Program Sekolah Penggerak kepada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengikutsertakan anaknya untuk masuk ke Program Sekolah Penggerak.

5. Dukungan para Stakeholder

a. Adanya Dukungan Pemerintah dan Instansi Terkait

Pemerintah Daerah belum optimal dalam memberikan dukungan seperti meja & kursi belajar, papan tulis, ruang praktek, komputer maupun bangunan yang layak selain itu pembiayaan juga sangat dibutuhkan.

b. Bentuk Dukungan Pemerintah dan Instansi Terkait

Komitmen pengurus BUMDes memang masih kurang baik dikarenakan belum sepenuhnya menjalankan peraturan pengelolaan BUMDes seperti pengadministrasian, pelaporan keuangan serta peningkatan produktivitas usaha.

6. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

a. Kondisi Sosial

Pada umumnya masyarakat butuh pembinaan Pendidikan bagi anak-anaknya yang optimal dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi siswa.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar adalah pedagang maupun buruh serabutan dan berpendidikan rendah sangat membutuhkan peningkatan Program Sekolah Penggerak tersebut untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-abak mereka.

Faktor Yang Mempengaruhi.

1. Faktor Penghambat

a. Sumber daya yang kurang memadai

Sumber daya yang kurang memadai dilihat dari kurangnya ketersediaan SDM pendidik dan tenaga kependidikan di daerah terpencil selain itu kendala akses SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian dan Berkelanjutan) serta jumlah personil di internal Dinas Pendidikan yang berwenang menyelesaikan isu eskalasi terbatas, selain itu Terbatasnya kemampuan para guru untuk mengembangkan kurikulum dalam proses pembelajaran dikarenakan kurangnya pelaksanaan pelatihan atau pembinaan teknis terkait penyelenggaraan program.

2. Faktor Pendorong

a. Tanggungjawab yang Tinggi

Para petugas memiliki tanggungjawab kerja yang cukup baik, hal tersebut dilihat dari taatnya mereka pada peraturan yang telah ditentukan.

SIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Aspek Pembelajaran (Studi Kasus di SMPN 1 Paringin dan SMPN 4 Awayan Kabupaten Balangan) cukup baik dilihat dari beberapa aspek yakni: Pertama, tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi kejelasan tujuan dan sasaran cukup baik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga memiliki kemampuan yang unggul dan ketepatan target kurang baik dikarenakan Kurang tercapainya sasaran dari program sekolah penggerak dikarenakan masih banyak para Guru yang kurang dapat mengikuti perkembangan digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi. Kedua, dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan meliputi dasar perumusan kebijakan sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan, fakta lapangan yang menjadi dasar pelaksanaan

Program Sekolah Penggerak sudah baik dan sesuai. Ketiga, proses implementasi memiliki dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum yang cukup baik dan sesuai, kemudian fakta lapangan dinilai baik dan sesuai untuk pengembangan kompetensi siswa serta SDM para Kepala Sekolah dan Guru-guru. Keempat, komitmen kerja yang cukup baik dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak dan keahlian petugas yang kurang baik dilihat dari ada Guru-guru dan Kepala Sekolah kurang memahami tujuan dari Program Sekolah Penggerak khususnya dalam digitalisasi system pendidikan serta menumbuhkembangkan kompetensi siswa atau siswi di sekolah Kabupaten Balangan, Kelima, dukungan para stakeholder yang meliputi dukungan pemerintah dan instansi terkait kurang baik terkait pemenuhan sarana prasarana untuk proses Pendidikan seperti meja & kursi belajar, papan tulis, ruang praktek, komputer maupun bangunan yang layak, bentuk dukungan pemerintah masih belum terealisasi secara optimal terkait pembiayaan maupun pemenuhan sarana prasarana untuk proses Pendidikan. Keenam, stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik berkaitan dengan kondisi sosial pada umumnya masyarakat butuh pembinaan Pendidikan bagi anak-anaknya yang optimal dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa, kondisi ekonomi masyarakat pada Kabupaten Balangan Sebagian besar pedagang, buruh serabutan dan berpendidikan rendah sehingga peningkatan pendidikan sangat dibutuhkan untuk masa depan.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Aspek Pembelajaran meliputi faktor penghambat yakni Sumber daya yang kurang memadai dilihat dari kurangnya ketersediaan SDM pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian faktor pendorong meliputi tanggungjawab kerja petugas pelaksana dinilai cukup baik dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak tersebut dengan mentaati peraturan terkait Program Sekolah Penggerak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2021. Kepmendikbudristek Nomor 162 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Penggerak
- Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta Pustaka Setia.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.
- Dunn, William. 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet. Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Moloeng, Lexy. J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2013. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Nur Mawaddah Islamiyah. 2015. *Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar (Studi Kasus di Sekolah Dasar Kota Bima, NTB)*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media
- Restu Rahayu. 2015. *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Samodra Wibawa. 2014, *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia
- Sinambela dkk, Lijan Poltak. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara



Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Calpulis

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Tim Penyusun Buku. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) STIA Amuntai*.